

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN I

BINMAS – SEKSI KEWASPADAAN DINI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan I ini yang berjudul “Laporan Triwulan I Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi T.A 2026” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi di bidang Pembinaan Masyarakat selama Triwulan I. Laporan Triwulan disusun sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan Triwulan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di masa yang akan datang.

Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,



Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19740425 200701 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.4 Anggaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	58
BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN	59
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	59
3.2 Kendala dan Solusi.....	60
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun 2026 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :

- 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

1.4 Anggaran

Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 173.920.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE REKUNING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
	JUMLAH		%					
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	197.920.700,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun Anggaran 2026, yaitu :

A. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Aksi Unjuk Rasa dari Elemen Masyarakat, Berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 38 / SATPOL.PP tanggal 9 Januari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat (Kalbar) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalbar, belum lama ini. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan terkait pembubaran Tarekat Al-Mu'Min.

Hasil Kegiatan :

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat(Kalbar) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalbar, belum lama ini. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan terkait pembubaran Tarekat Al-Mu'min. Massa yang dipimpin koordinator lapangan Afriansyah menyampaikan orasi di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai berorasi, sebanyak 15 orang perwakilan massa diterima pihak Polda Kalbar untuk melakukan audiensi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Audiensi dipimpin Wakil Direktur Reskrimum Polda Kalbar AKBP Siswo Dwi Nugroho, didampingi Kasubdit 1 Ditreskrimum Kompol Lely Suheri, serta sejumlah pejabat utama Polda Kalbar. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Umat Islam Bersatu Kalbar yang didukung LPM, SPM, IKBM, dan LKM menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak pembubaran Tarekat Al-Mu'min. Kedua, meminta aparat kepolisian mengadili pimpinan tarekat tersebut, Muhammad Efendi Sa'ad. Menanggapi aksi tersebut, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengapresiasi sikap kooperatif

massa dalam menyampaikan aspirasi. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan Aliansi yang telah menyampaikan tuntutanannya dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga situasi tetap kondusif,” ujar Bambang. Ia menegaskan Polda Kalbar terbuka terhadap seluruh aspirasi dan aduan masyarakat. Terkait tuntutan pembubaran serta proses hukum terhadap pimpinan tarekat, Bambang memastikan seluruh laporan akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.

Polda Kalbar menerima laporan masyarakat dari mana pun. Seluruh laporan akan diproses sesuai ketentuan, dan standar operasional prosedur penanganan perkara, serta disampaikan secara transparan kepada publik. Audiensi berakhir dengan tertib pada sore hari. Massa kemudian membubarkan diri secara teratur setelah memperoleh penjelasan dari pihak kepolisian Fatwa MUI Kalbar Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi telah menerbitkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2025 yang menyatakan ajaran Tarekat Al-Mu'min sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Dokumen fatwa tersebut diserahkan secara simbolis kepada Pimpinan Tarekat Al-Mu'min, Muhammad Effendy Saad, dalam sebuah pertemuan silaturahmi di Sekretariat MUI Kalbar pada Selasa, 5 Agustus tahun lalu.

Peserta aksi dari Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat membawa poster saat berunjuk rasa di Polda Kalimantan Barat, Jumat (9/1/2026). Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat mendesak Polda Kalbar untuk membubarkan Tarekat Al-Mu'min serta menangkap pimpinannya Muhammad Effendi Saad setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat yang secara resmi menyatakan ajaran Tarekat Al-Mu'min sebagai ajaran sesat dan menyesatkan.

Demikian dilaporkan Pada Kegiatan Unjuk Rasa Aliansi Umat Islam Bersatu Kalimantan Barat (Kalbar) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalbar, belum lama ini. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan terkait pembubaran Tarekat Al-Mu'min Di Halaman Polda Kalbar Provinsi Kalimantan Barat.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 77 / SATPOL.PP tanggal 15 Januari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmandapar Di Gedung Dprd Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- a. Pada pukul 15.15 WIB : Massa aksi berkumpul di Indomaret Deretan Kimia Farma sebelum Paris 1;

- b. Pukul 15.30 WIB Massa aksi menuju Kantor DPRD Prov Kalbar dengan berjalan kaki (Longmarch);
 - c. Pada pukul. 15.35 WIB Massa aksi tiba di Kantor DPRD selanjutnya Orasi
 - d. Pada pukul.16.10 WIB Bapak Rasmidi Ketua Komisi 1 fraksi Demokrat menemui mahasiswa, Wakil Ketua Ibu Hadijah dari Fraksi Nasdem, Wakil Ketua Pak Prabasa dari Fraksi GolkaR, Wakil Ketua Pak Nofal dari Fraksi Gerindra dan Pak Alexander dari Fraksi Gerindra.
 - e. Aksi mahasiswa di gedung Kantor DPRD Kalbar, MENUNTUT :
 - Mengecam keras DPRD Kalimantan Barat umuk memperhatikan dan mengikuti kehendak masyarakat Kalimantan Barat saat ini.
 - Mendesak DPRD Kalimantan Barat untuk menyatakan sikap terkait sistem pemilihan Kepala Daerah tanpa mengikuti keputusan partal
 - Menuntut DPRD Kalimantan Barat untuk menyampaikan rekomendasi terhadap DPR RI, untuk membahas hal-hal yang lebih genting.
 - f. Pada pukul 17.22 WIB massa aksi demo meninggalkan gedung DPRD Prov.Kalbar tanpa ada gangguan trantibum.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 267 / SATPOL.PP tanggal 06 Februari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmandapar Di Gedung Dprd Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

- a. Pada pukul 15.15 WIB Massa aksi berkumpul di Indomaret Deretan Kimia Farma sebelum Paris.
- b. Pukul 15.30 WIB Massa aksi menuju Kantor DPRD Prov Kalbar dengan berjalan kaki (Longmarch)
- c. Pada pukul. 15.35 WIB Massa aksi tiba di Kantor DPRD selanjutnya Orasi
- d. Pada pukul.16.10 WIB Bapak Rasmidi Ketua Komisi 1 fraksi Demokrat menemui mahasiswa, Wakil Ketua Ibu Hadijah dari Fraksi Nasdem dan Wakil Ketua Pak Prabasa dari Fraksi Golkar.

Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tergabung dalam Solmadapar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat sore Aksi yang diikuti oleh belasan mahasiswa tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Massa aksi menyampaikan aspirasi terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan guru honorer di Kalimantan Barat.

Setibanya di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, para mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Penyampaian aspirasi dilakukan secara dialogis dengan duduk bersama

di halaman Kantor DPRD, sehingga suasana aksi berlangsung aman dan penuh kekeluargaan.

Polresta Pontianak memberikan pelayanan pengamanan secara maksimal, dimulai dari titik kumpul massa hingga lokasi aksi. Personel kepolisian juga melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi kepada koordinator lapangan guna memastikan aksi berjalan tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, serta tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si., melalui Kabag Ops Polresta Pontianak, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. "Polresta Pontianak hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada para peserta aksi, mulai dari titik kumpul hingga ke lokasi aksi. Kami juga melakukan negosiasi dan pendekatan humanis agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," ujar Kabag Ops Polresta Pontianak. Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat terpantau aman dan kondusif, tanpa adanya gangguan kamtibmas.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 312 / SATPOL.PP tanggal 13 Februari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Oleh BEM Di Gedung Dprd Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

- a. Pada pukul 15.15 WIB Massa aksi berkumpul di Indomaret Deretan Kimia Farma sebelum Paris 1;
- b. Pukul 15.30 WIB Massa aksi menuju Kantor DPRD Prov Kalbar dengan berjalan kaki (Longmarch);
- c. Pada pukul. 15.35 WIB Massa aksi tiba di Kantor DPRD selanjutnya Orasi

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Peserta aksi yang diketahui dari Solmadapar dan Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), menggelar aksi menyampaikan beberapa orasi tuntutan suara masyarakat. Aksi tersebut diterima langsung Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar. Ia menemui massa aksi dan menerima dokumen berisi poin-poin tuntutan yang diserahkan mahasiswa. Koordinator aksi, Muhammad Iqbal, menyatakan demonstrasi dilakukan sebagai respons atas dinamika politik nasional dan daerah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat. Kami melihat ada upaya sistematis untuk melemahkan demokrasi melalui wacana sistem pemilihan tertutup dan pengabaian terhadap

penegakan hukum yang progresif Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, menolak wacana penyelenggaraan Pilkada secara tertutup dan mendesak Pemerintah serta DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Rakyat memiliki hak penuh untuk mengenal dan memilih langsung pemimpinnya. Pilkada tertutup berpotensi mengurangi partisipasi publik,” tegas Iqbal.

Kedua, mahasiswa mengecam DPRD Kalimantan Barat yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan partai politik dibandingkan kepentingan rakyat. "DPRD seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan elite partai.

Ketiga, menolak draf RUU Pilkada tertutup karena dinilai berpotensi memindahkan praktik politik uang ke lingkup internal DPRD, sehingga menutup ruang pengawasan publik.

Keempat, massa mengecam segala bentuk perubahan sistem pemilu yang dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi tidak boleh mati di tangan mereka yang kita percayakan untuk menjaganya. Hari ini kami bersuara karena diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Aksi ini diikuti mahasiswa dari Solmadapar dan Politeknik Negeri Pontianak, serta mendapat dukungan dari perwakilan BEM Universitas OSO (Unoso) dan BEM UPGRI Pontianak yang turut menandatangani berkas tuntutan. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, massa membubarkan diri.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 367 / SATPOL.PP tanggal 24 Februari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Masyarakat Desa Sadaniang Kabupaten Mempawah Di Kantor Kajati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Personel Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat Desa Pentek, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap) Sdr. Hendri. Dalam orasinya, massa menyampaikan tuntutan kepada Satgas PKH agar mencabut pemalangan lahan masyarakat yang dinilai menghambat aktivitas warga. Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif, pengamanan aksi (Pam Unras) dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polresta Pontianak Kopol Joko Sutriyatno, S.H. Personel ditempatkan di sejumlah titik guna mengantisipasi gangguan

kamtibmas serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Perwakilan massa unjuk rasa kemudian diterima oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kajati Kalbar, Yadi Rahmad Sunaryado, S.H., M.H., untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di dalam kantor. Kapolresta Pontianak Konbea Pol Endang Tri Purwanto, S.I.K.,M.Si. melalui Kabag Ops menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional, dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif hingga aksi unjuk rasa selesai dilaksanakan.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 368 / SATPOL.PP tanggal 24 Februari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmandapar Di Gedung Dprd Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pada 24 Februari 2026 di Kota Pontianak telah diperoleh informasi dari Hafiz Azhari (Badko HMI Kalbar) terkait Kondoslidasi Akbar Mahasiswa Se-Kalbar dilaporkan sebagai berikut :

- a. Hasil pendalaman aksi :
Aksi dilaksanakan pada : Kamis 24 Februari 2026.
- b. Waktu pelaksanaan aksi : 13.00 WIB – Selesai.
- c. Titik Kumpul aksi : Universitas Muhammadiyah Pontianak Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
- d. Pelaksanaan aksi : Kantor DPRD Prov. Kalimantan Barat, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
- e. Perkiraan jumlah massa : ± 125 orang yang diikuti oleh Mahasiswa IAIN, POLNEP, UMP, Stikes Yarsi, Poltekes, dan FKBK (Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Kalbar).
- f. Alat : Bendera BEM masing-masing kampus, Banner, Poster, dan toa (Pengeras Suara).
- g. Adapun, tuntutan yang akan disampaikan :
 - ✓ Menuntut pemerintah pusat untuk evaluasi total program prioritas MBG.
 - ✓ Menuntut presiden Prabowo untuk segera mereformasi Polri.
 - ✓ Mendesak bpk ri untuk melakukan audit investigatif terhadap Satgas MBG (Maling Berkedog Gizi).
 - ✓ Menuntut percepatan skema WPR.
 - ✓ Mendesak presiden Prabowo untuk mengembalikan pendidikan menjadi program prioritas utama.
 - ✓ Mendesak presiden untuk mensejahterakan Guru.

- ✓ Menuntut gubernur kalbar untuk meningkatkan IPM secara progresif.
 - ✓ Menuntut secara keras Gub Kalbar untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pemerataan tenaga medis.
- h. Aksi akan dipimpin oleh Haidar Ali (Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara IAIN Pontianak) sebagai Korlap.
- i. Konsolidasi dilaksanakan di IAIN Pontianak, pada 24 Februari 2026 pukul 21.15 s.d 23.43 WIB dan diikuti ± 40 orang.
7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 383 / SATPOL.PP tanggal 26 Februari 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Kalbar Menggugat Di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Aliansi Kalbar Menggugat Sampaikan 8 Tuntutan ke DPRD Kalbar, Berikut Poin-poinnya: Desak Evaluasi Total MBG hingga Reformasi Kebijakan Peserta Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Kalbar Menggugat terdiri dari perwakilan BEM seluruh Kalimantan Barat menyerahkan delapan berkas tuntutan ke pimpinan DPRD Kalbar

Peserta Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Kalbar Menggugat terdiri dari perwakilan BEM seluruh Kalimantan Barat menyerahkan delapan berkas tuntutan ke pimpinan DPRD Kalbar Aksi Aliansi Kalbar Menggugat tak hanya berlangsung di halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat. Di dalam Ruang Rapat Paripurna, perwakilan puluhan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan langsung delapan poin tuntutan kepada pimpinan dewan, Massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kalbar Hj. Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Ir. H. Prabasa Anantatur, Wakil Ketua III Nofal Nofiendra, serta Ketua Fraksi PAN/Sekretaris Komisi I Zulfydar Zaidar Mochtar.

Aliansi yang terdiri dari FKBK Kalbar, FOMDA Kalbar, BEM SI Kalbar, BEM NUS Kalbar, BEM SEKA Kalbar, FKMPI, BEM PTMAI Zona II, AMAN Kalbar dan sejumlah perwakilan kampus lainnya itu menegaskan delapan tuntutan utama, mulai dari evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), reformasi Polri, hingga percepatan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Koordinator Wilayah BEM SI Kalimantan Barat, Syayid Zaki Alfaridzi, dalam penyampaianya menilai pelaksanaan program MBG di era Presiden Prabowo Subianto belum berjalan optimal. Ia bahkan menyebut terdapat dugaan penyimpangan anggaran dalam distribusi makanan kepada pelajar. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan MBG ini, maka yang diperlukan adalah pengawasan dan transparansi kepada publik dalam pelaksanaannya,” ujarnya di hadapan pimpinan dewan.

Mahasiswa juga meminta pemerintah menempatkan tenaga ahli gizi di setiap dapur MBG agar kualitas makanan benar-benar terjamin. Mereka menilai pengawasan ketat menjadi kunci agar siswa tidak dirugikan akibat kelalaian teknis maupun manajerial. Selain itu, massa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit investigatif terhadap Satuan Tugas MBG untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan anggaran. [08:28, 05/03/2026] Roy D: ak hanya isu nasional, mahasiswa juga menyoroti persoalan daerah. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalbar meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara progresif serta memperbaiki pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di 14 kabupaten/kota. Momentum satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar juga menjadi sorotan. Mahasiswa mengingatkan agar pembangunan tidak bersifat “Pontianak sentris”, melainkan merata hingga daerah perbatasan dan pedalaman. Dalam forum tersebut, mahasiswa turut menyinggung pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp25,8 triliun terkait pertambangan ilegal di Kalbar oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri). Mereka menilai hal itu menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya alam belum berjalan optimal dan perlu pengawasan lebih ketat.

Aliansi Kalbar Menggugat Sampaikan 8 Tuntutan ke DPRD Kalbar, Berikut Poin-poinnya: Desak Evaluasi Total MBG hingga Reformasi Kebijakan Peserta Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Kalbar Menggugat terdiri dari perwakilan BEM seluruh Kalimantan Barat menyerahkan delapan berkas tuntutan ke pimpinan DPRD Kalbar Peserta Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Kalbar Menggugat terdiri dari perwakilan BEM seluruh Kalimantan Barat menyerahkan delapan berkas tuntutan ke pimpinan DPRD Kami minta lembaga legislatif melaksanakan tupoksinya agar mengawasi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Baik dalam peningkatan IPM, kesehatan, maupun pengelolaan SDA,” tegas perwakilan mahasiswa lainnya.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 399 / SATPOL.PP tanggal 02 Maret 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan aksi Aliansi Mahasiswa Kalbar Di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Sekitar 80 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak yang tergabung dalam BEM REMA menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Lima Tuntutan Satu Tujuan” di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (2/3) pukul 14.00 WIB. Namun lelet hingga masa aksi baru berkumpul sekitar pukul 16.00 WIB. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan.

Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, serta Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, di ruang Balairungsari Gedung DPRD Kalbar. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan nota protes dan berharap aspirasi mereka diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Mahasiswa BEM REMA Universitas PGRI Pontianak, Agung S., menyatakan pihaknya menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang disebut dialihkan untuk pembiayaan MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan nasional. Kami menolak pendidikan dijadikan tumbal kebijakan. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan,” tegasnya dalam orasi. Koordinator lapangan aksi, Julius, menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa, yakni Menghadirkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar untuk menerima aspirasi. Kemudian, mendesak Presiden mengembalikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas nasional, menolak pemangkasan anggaran pendidikan untuk pembiayaan MBG dan meminta penghentian sementara program MBG selama bulan Ramadan guna evaluasi menyeluruh.

Mereka menegaskan aksi tersebut bukan sekadar protes, melainkan upaya mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan generasi bangsa. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir menjelang berbuka puasa, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kalimantan Barat terkait tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa tersebut.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 429 / SATPOL.PP tanggal 06 Maret 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmadapar Di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Personel Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tergabung dalam Solmadapar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat sore Aksi unjuk rasa tersebut dikoordinir oleh Sekjen Solmadapar, Asep dengan jumlah massa sekitar 11 orang.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait permasalahan ketenagakerjaan yang dinilai masih merugikan para pekerja dan buruh.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi antara lain masih banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan, pemberian upah atau gaji pekerja yang dinilai tidak layak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serta masih adanya perusahaan yang belum memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh pihak Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan dialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

Adapun pihak yang menerima massa aksi di antaranya Sekretaris Disnakertrans Kalbar Dr. Muhaimenon, Kepala Bidang Hubungan Industrial Pitter Bonis, Kepala Bidang Pengawas Tenaga Kerja Erika Fitranova, serta Kasi Perselisihan Bidang Hubungan Industrial Yohanna.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Disnakertrans Provinsi Kalbar menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan aman serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat

Dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian, kegiatan aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif hingga selesai.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 477 / SATPOL.PP tanggal 09 Maret 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Unjuk Rasa Solmadapar Di Kantor Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Personel Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tergabung dalam Solmadapar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat sore Aksi unjuk rasa tersebut dikoordinir oleh Sekjen Solmadapar, Asep dengan jumlah massa sekitar 7 orang. Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh pihak Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan dialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

Adapun pihak yang menerima massa aksi di antaranya Sekretaris Disnakertrans Kalbar Dr. Muhaimenon, Kepala Bidang Hubungan Industrial Pitter Bonis, Kepala Bidang Pengawas Tenaga Kerja Erika Fitranova, serta Kasi Perselisihan Bidang Hubungan Industrial Yohanna. Dalam pertemuan tersebut, pihak Disnakertrans Provinsi Kalbar menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyampaikan bahwa pihak

kepolisian hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan aman serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat Dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian, kegiatan aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif hingga selesai.

11. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 507 / SATPOL.PP tanggal 27 Maret 2026, Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Aliansi Guru PPPK Paruh Waktu Provinsi Kalimantan Barat Di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pada pukul 09:00 dilakukan aksi audiensi terkait hak-hak dan kewajiban guru p3k paruh waktu diwilayah Kalimantan Barat, dalam aksi ini dipimpin oleh Ketua Aliansi Rita Sri Erviani, S.E.I dengan jumlah perwakilan 10 orang dari berbagai sekolah dan daerah yang ada di Kalbar dalam aksi audiensi ini juga dihadiri oleh Plt Kadis Dikbud, BKD Prov Kalbar dan beberapa pejabat dari dinas terkait.

Aksi dimulai dengan paparan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh p3k paruh waktu yang tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya adapun beberapa poin yang disimpulkan sebagai berikut.

- ✓ Menuntut penyesuaian jam kerja, diwajibkan dalam 1 minggu mencapai minimal 20 – 40 JP dengan status P3K paruh waktu dan gaji yg diperoleh sangat dipastikan tidak seimbang antara beban kerja yang ditanggung dengan hak yang diperoleh
- ✓ Menanyakan terkait SK yang perhari ini belum di ttd oleh Sekda sehingga belum ada kepastian utk nominal gaji
- ✓ Meminta penjelasan terkait kasus kelebihan gaji yg ditransfer balik ke rekening pribadi bukan rekening resmi instansi, karna hal itu timbul kecurigaan dari guru P3K paruh waktu

Menanggapi hal tsb Plt Dikbud menyatakan berdasarkan standar pelayanan seorang guru sudah ada batas minimal kerja yaitu 20 JP dalam seminggu oleh karena itu diminta guru menyesuaikan utk hal tsb,

dan masalah pengembalian kelebihan gaji dilakukan transfer ke rekening pribadi dikarenakan utk penggajian P3K paruh waktu menggunakan anggaran belanja barang dan jasa bukan menggunakan belanja pegawai sehingga tidak ada rekening khusus utk menampung sistem penggajian guru P3K paruh waktu. Dengan penjelasan tsb bisa diterima oleh perwakilan guru p3k paruh waktu dan audiensi berjalan dengan lancar aksi audiensi selesai dilakukan jam 12:00 berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa ada potensi gangguan trantibum.

B. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Lokasi Atau Aset Milik Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 113 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Januari 2026, dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Baznas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Hasil temuan di lapangan :

Gubernur Kalbar Ria Norsan (per Jan 2026) menekankan perlunya BAZNAS Kalbar yang visioner, transparan, dan profesional untuk mengelola potensi zakat, infak, dan sedekah guna memberdayakan ekonomi umat serta menanggulangi kemiskinan. Pemprov Kalbar mendorong sinergi, termasuk implementasi Payroll System Zakat ASN untuk pengumpulan zakat yang lebih terstruktur. Berikut adalah poin-poin utama audiensi dan sinergi BAZNAS dengan Gubernur Kalbar: Peningkatan Potensi Zakat: Gubernur meminta BAZNAS Kalbar menjadi motor penggerak ekonomi umat, tidak hanya fokus pada pendistribusian konsumtif, tetapi juga produktif. Transparansi dan Profesionalisme:

Pengurus BAZNAS diminta mengelola dana secara transparan dan amanah untuk membangun kepercayaan publik. Payroll System Zakat ASN: Resmi diluncurkan pada Mei 2025, langkah ini memperkuat solidaritas sosial dan membantu pemberdayaan ekonomi melalui zakat profesi ASN Muslim. Studi Banding: Gubernur menyarankan BAZNAS Kalbar mempelajari pengelolaan zakat produktif, seperti di Kuching, Malaysia, untuk membangun aset ekonomi umat. Sinergi Program: BAZNAS diharapkan berkolaborasi dengan Pemprov dan Kanwil Kemenag Kalbar untuk program penguatan pemberdayaan umat yang lebih berdampak nyata. Audiensi tersebut menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam menjadikan zakat sebagai instrumen strategis pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, didukung pengurus BAZNAS Kalbar periode 2025–2030 yang diharapkan lebih inklusif.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 112 /SATPOL.PP-B tanggal 20 Januari 2026, dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelantikan Pengurusan Special Olympics Indonesia Masa Bakti 2025-2029 Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan anggota Pol PP yang piket di Pendopo Gubernur dan panitia kegiatan

Hasil temuan di lapangan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan secara resmi menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Special Olympics Indonesia (SOIna) Kalimantan Barat masa bakti 2025–2029 yang dinahkodai oleh Stephani Yane, bertempat di Pendopo Gubernur Pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua I Pengurus Pusat SOIna, Novia, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat SOIna Nomor: SK-05/PP-SOIna/VII-2025 yang disahkan oleh Warsito Ellwein, sebagai upaya menjaga kesinambungan program dan organisasi. Gubernur Ria Norsan menegaskan kehadiran SOIna merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui olahraga, kita ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik atau kognitif bukanlah akhir dari segalanya, melainkan warna berbeda yang memperindah pelangi kehidupan kita. Tugas pengurus SOIna yang baru bukan hanya mencetak juara di podium, tetapi menghadirkan ‘kemenangan’ dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka. Jadilah lilin

yang menerangi jalan mereka untuk mandiri dan percaya diri. Saya titipkan anak-anak istimewa ini kepada Bapak dan Ibu sekalian, pastikan tidak ada satu pun dari mereka yang merasa sendirian dalam perjuangannya,” ucap Norsan dengan penuh ketulusan sembari menitikkan air mata,

Terkait capaian daerah, Gubernur juga mengaitkan semangat inklusivitas tersebut dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang kini berada pada kategori tinggi dengan angka 72,09 pada tahun 2025. Angka-angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan sebuah harapan. Harapan agar anak-anak bertalenta khusus di Kalimantan Barat memiliki masa depan yang lebih sehat, kesempatan belajar yang lebih luas, serta standar hidup yang lebih layak. Ketua SOIna Kalimantan Barat masa bakti 2025–2029, Stephani Yane, M.Pd., menuturkan bahwa pelantikan ini merupakan langkah positif dalam menggaungkan kepedulian bersama terhadap saudara-saudara bertalenta khusus, Sebagai agenda strategis ke depan, kepengurusan yang baru dilantik ini akan mempersiapkan para atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Special Olympics Indonesia Nasional (PESONAS) Tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 118 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Januari 2026, dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rangkaian Peringatan Hut Ke 69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Hasil temuan di lapangan

Aksi sosial donor darah yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat (Kalbar) mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan darah di fasilitas kesehatan. Kegiatan yang merupakan bagian dari program ASN Kalbar Peduli ini berhasil mengumpulkan 160 kantong darah, melampaui target awal. Donor darah tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah serta masyarakat umum. Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menegaskan bahwa aksi donor darah ini merupakan bentuk kepedulian konkret pemerintah daerah terhadap kebutuhan layanan kesehatan

masyarakat, khususnya ketersediaan stok darah. Menurut Windy, donor darah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan aksi kemanusiaan yang berdampak langsung bagi keselamatan pasien. Ketersediaan darah sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan medis, mulai dari kondisi darurat, tindakan operasi, hingga perawatan penyakit tertentu. Setiap kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi. Ini adalah kontribusi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan,” ujarnya. Ia menambahkan, peringatan HUT ke-69 Pemprov Kalbar dimaknai tidak hanya sebagai refleksi perjalanan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum memperkuat nilai empati, dan solidaritas sosial, terutama di kalangan ASN. Windy menilai, kegiatan donor darah sejalan dengan nilai dasar ASN sebagai pelayan publik.

ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Kontribusi sederhana yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan dampak besar. Setiap tetes darah yang disumbangkan adalah harapan bagi Melalui kegiatan tersebut,

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 214 / SATPOL.PP-B tanggal 29 Januari 2026, dilaksanakan pada, 29 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pasar Murah Di Halaman Kantor Ketahanan Pangan Rangkaian Peringatan Hut Ke 69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Hasil temuan di lapangan :

Antusias masyarakat terlihat tinggi saat memadati halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Adisucipto, Kamis 29 Januari 2026. Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar diserbu warga sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Dony Saiful Bahri, mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalbar ke-69 sekaligus menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Imlek dan bulan suci Ramadan.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 227 /SATPOL.PP-B tanggal 30 Januari 2026, dilaksanakan pada, 30 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Isra' Mi 'Raj 1447 H Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Hasil temuan di lapangan :

Pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama ASN Pemprov Kalbar, Gubernur Ria Norsan menegaskan kembali esensi shalat sebagai fondasi spiritual dalam kehidupan, termasuk di tengah kesibukan melayani masyarakat. Seluruh ASN diajak untuk tidak melalaikan shalat lima waktu, karena dari sanalah disiplin, keikhlasan, dan integritas bermula. Sesibuk apa pun aktivitas, panggilan azan adalah pengingat untuk sejenak berhenti dan kembali kepada -Nya. Melalui peringatan Isra Mi'raj, semoga nilai-nilai spiritual semakin menguatkan komitmen dalam bekerja dan mengabdikan secara tulus Yang Di Sampai Oleh Ustad Kh Saptiar Daeng di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 310 /SATPOL.PP-B tanggal 12 Februari 2026, dilaksanakan pada tanggal, 12 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Hasil temuan di lapangan

Generasi muda Kalimantan Barat kini memiliki wadah baru untuk mengasah jiwa kewirausahaan. Badan Koordinasi Daerah Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Kalimantan Barat (BAKORDA HIPMI PT Kalbar) Periode 2026–2028 resmi dikukuhkan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pelantikan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai bagian dari penggerak ekonomi daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam sambutannya menekankan besarnya peluang usaha di Kalbar yang ditopang kekayaan sumber daya alam. Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan potensi daerah. Saya ingin anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda HIPMI PT ini mereka menjadi pemeran utama, bukan pemeran figuran dalam mengelola sumber daya alam Provinsi Kalimantan Barat,” tegas Krisantus. Menurutnya, peluang usaha terbuka lebar asalkan generasi muda berani mengambil langkah. Ia mendorong mahasiswa untuk aktif menjemput kesempatan, termasuk memanfaatkan program kredit modal usaha yang disalurkan oleh bank daerah maupun perbankan lainnya. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap memberikan dukungan sepanjang pengurus BAKORDA HIPMI PT Kalbar mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal hingga akhir masa jabatan. Selamat bertugas. Laksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengurus Bakorda HIPMI PT. Peluang sudah saya sampaikan, Kalimantan Barat ini memiliki banyak kesempatan asal kita kreatif,” pesannya.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 314 / SATPOL.PP-B tanggal 13 Februari 2026, dilaksanakan pada tanggal, 13 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Pengurus Daerah Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Satpol PP Provinsi Kalimantan barat

Hasil temuan di lapangan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Kalbar, memimpin kegiatan gashuku (latihan bersama) yang diikuti karateka tingkat kyu (mudansa) di halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan ujian penurunan kyu dan kenaikan tingkat bagi para karateka Inkanas Kalbar. Sebelum latihan

dimulai, Krisantus menegaskan bahwa gashuku bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dalam pembentukan karakter dan mental atlet.

Menurutnya, meski metode latihan kini lebih modern dan aman dengan penggunaan pelindung saat bertanding, semangat dan daya juang tidak boleh luntur. Wagub menekankan pentingnya disiplin dan konsistensi dalam berlatih karate sebagai bela diri tangan kosong. “Kekuatan, kecepatan, kontrol, dan penguasaan teknik harus terus diasah. Disiplin adalah kunci,” tegasnya. Sebagai Ketua Umum Inkanas Kalbar, ia berharap organisasi tersebut terus berkembang dan mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Saya ingin Inkanas menjadi yang terbaik di Kalbar.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 406 / SATPOL.PP-B tanggal 03 Maret 2026, dilaksanakan pada tanggal, 03 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Buka Puasa Bersama DI Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan semua tim Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat

Hasil temuan di lapangan :

Silaturahmi Ramadan 1447 H yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan suci sebagai momentum memperkuat ukhuwah, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga harmoni demi mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa silaturahmi yang terjaga dengan baik akan membawa keberkahan, memperkuat persatuan, dan memudahkan langkah bersama dalam membangun Kalimantan Barat. Kegiatan yang didukung Dewan Masjid Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, serta berbagai unsur masyarakat ini juga diisi dengan penyaluran santunan kepada anak yatim dan dhuafa bersama Baznas dan dukungan Harita Group. Kebersamaan ini menjadi cerminan semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat Kalimantan Barat di bulan penuh berkah.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 478 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026, dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Open House Di Pendopo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Plt kewaspadaan dini Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
- Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat.

Hasil temuan di lapangan

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan jajaran Forkopimda Kalbar saat Open House Idul Fitri 1447 Hijriah

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menggelar kegiatan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan masyarakat Kalimantan Barat. Kegiatan open house tersebut berlangsung selama dua hari di Pendopo Gubernur. Kegiatan ini terbuka untuk umum tanpa undangan khusus, sebagai bentuk kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tidak hanya masyarakat umum, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya yang turut memeriahkan momentum kebersamaan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyampaikan bahwa Idul Fitri merupakan momen kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Ia mengajak masyarakat untuk merayakan hari kemenangan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan open house ini tidak membedakan siapa pun yang hadir. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk datang dan bersilaturahmi. Pendopo ini terbuka untuk semua. Tidak ada batasan, tidak ada perbedaan. Kita ingin merayakan kebersamaan,” tambahnya. Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan sebagai modal utama dalam membangun daerah. Melalui silaturahmi ini, kita berharap dapat memperkuat persatuan dan bersama-sama membawa Kalimantan Barat menjadi lebih maju. Sementara itu, Ketua TP PKK Kalimantan Barat, Erlina Norsan, juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat. Ia berharap momentum Lebaran dapat membawa keberkahan, kesehatan, serta semangat baru dalam kehidupan.

C. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Kegiatan Kerja Gubernur dan Wagub Kalbar, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 48 / SATPOL.PP tanggal 9 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 9 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi Mayjen TNI Jamallulael selama bertugas di Kalimantan Barat, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah. Ia berharap sinergi yang telah terbangun antara TNI dan Pemerintah Daerah dapat terus diperkuat dan berlanjut bersama Pangdam yang baru demi mendukung kelancaran pembangunan daerah. Selamat bertugas di amanah baru, semoga sukses dan terus mengabdikan untuk negeri. Semoga pengalaman dan pengabdian yang telah diberikan di Kalimantan Barat menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas selanjutnya, serta membawa manfaat yang lebih luas bagi institusi dan bangsa.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 47 / SATPOL.PP tanggal 9 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 9 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Peningkatan kualitas pendidikan terus menjadi bagian penting dalam pembangunan Kalimantan Barat. Beroperasinya kembali Sekolah Harapan Bangsa (SHB) di Kubu Raya diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Gubernur Kalbar Ria Norsan menekankan bahwa kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas

sumber daya manusianya. Melalui dukungan sarana pendidikan yang memadai dan kurikulum berkualitas, sekolah diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menyiapkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Selain penguatan akademik, pendidikan juga diarahkan untuk membentuk karakter, integritas, serta kepedulian sosial peserta didik agar tetap berakar pada nilai dan budaya lokal Kalimantan Barat. Sinergi antara pemerintah, yayasan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 119 / SATPOL.PP tanggal 20 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada kegiatan Pelantikan pengurus DPD Partai Hanura Prov Kalbar Di Kubu Resort di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Ketua DPD Hanura Kalbar yang baru dilantik, Dian Eka Muchairi, menyatakan siap membawa Hanura semakin besar di Kalimantan Barat. Ia menargetkan penguatan struktur partai hingga tingkat ranting serta kesiapan menghadapi verifikasi Pemilu. Kami siap lolos verifikasi dan menang di Pemilu 2029. Target kami, Hanura kembali masuk parlemen dan mendudukkan kader di DPRD di setiap daerah pemilihan di Kalbar. Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus Hanura Kalbar dan mengajak seluruh partai politik memperkuat sinergi demi pembangunan daerah. Partai politik adalah mitra strategis pemerintah. Kami terbuka untuk dialog dan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," kata Norsan. Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi dan penetapan arah perjuangan Partai Hanura di Kalimantan Barat untuk lima tahun ke depan.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 127 / SATPOL.PP tanggal 21 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Kamis-Jum'at, tanggal 22-23 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rangkaian Peringatan Hut Ke 69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Sekda Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam menjaga kebugaran jasmani ASN sekaligus memperkuat kebersamaan dan persatuan lintas instansi. ASN yang sehat dinilai akan lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Turnamen ini juga menjadi bukti bahwa kemampuan olahraga ASN Kalbar cukup merata dan kompetitif. Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan olahraga pada berbagai momentum sebagai sarana membangun soliditas dan semangat kebersamaan ASN se-Kalimantan Barat.

Selamat kepada ASN Kabupaten Sanggau sebagai juara. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia atas partisipasi, sportivitas, dan semangat persatuan yang ditunjukkan. Kejuaraan Tenis Meja dalam rangka HUT ke-69 Pemprov Kalbar tahun 2026 diselenggarakan pada 22-23 Januari 2026 di Aula Enggang, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Kalbar. Turnamen ini diikuti oleh ASN dengan kategori pertandingan tunggal eksekutif, ganda putra, dan ganda putri untuk mempererat sinergi.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 128 / SATPOL.PP tanggal 21 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Upacara Ziarah Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, memimpin Upacara Penghormatan kepada Jasa Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dharma Patria Jaya, Jumat (23/1/2026). Wagub Kalbar bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara ziarah tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar. Wagub Kalbar menegaskan bahwa ziarah ke Taman Makam Pahlawan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan merefleksikan perjalanan panjang Provinsi Kalimantan Barat yang kini telah memasuki usia ke-69 tahun. Enam puluh sembilan tahun adalah usia yang panjang dan

matang. Ini menjadi momentum refleksi terhadap proses pemerintahan dan pembangunan Kalimantan Barat selama ini.”

Lebih lanjut, Wagub Kalbar mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga dan merawat Kalimantan Barat secara bersama-sama dengan menjadikan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama dalam melanjutkan pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa semangat juang para pahlawan harus senantiasa menjadi inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, khususnya dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. Peringatan HUT ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan ziarah dan penghormatan kepada pahlawan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai nasionalisme, kebersamaan, serta semangat membangun daerah demi masa depan Kalimantan Barat yang lebih baik.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 135 / SATPOL.PP tanggal 22 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Musawarah Kadin Prov Kalbar Di Hotel Alimoer Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa kepengurusan Kadin Kalbar yang sah berada di bawah kepemimpinan Arya Rizqi Darsono. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kegiatan yang mengatasnamakan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Kalbar yang digelar pada 22 Januari 2026 di Hotel Alimoer, Kubu Raya. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Kalbar, Henray, menyatakan kegiatan tersebut inkonstitusional dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Muprov yang digelar di Hotel Alimoer tidak sah dan tidak sesuai mekanisme organisasi. Kadin Kalbar yang sah berada di bawah kepemimpinan Arya Rizqi Darsono, yang terpilih melalui Musyawarah Provinsi VII pada 9 Agustus 2024 di Hotel Ibis Pontianak, dengan masa jabatan 2024–2029. Henray menjelaskan, Pasal 25 Anggaran Dasar Kadin secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan Musyawarah Provinsi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Kadin Indonesia.

Masa jabatan Ketua Umum Kadin Kalbar sampai 2029 dan tidak ada pelanggaran organisasi. Kadin ini organisasi besar, ada aturan mainnya, bukan sekadar ajang deklarasi,” tegas Jamaan. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa seluruh ketentuan organisasi Kadin dapat diakses

secara terbuka melalui laman resmi Kadin Indonesia, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022. Menurut Jamaan, selama kepemimpinan Arya Rizqi Darsono, Kadin Kalbar telah mengalami banyak perubahan positif, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun program kerja yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan BUMN. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun surat dari Kadin Indonesia yang memberhentikan kepengurusan Kadin Kalbar di bawah Arya Rizqi Darsono, maupun surat penunjukan caretaker sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Kadin. Masa jabatan Ketua Umum Kadin Kalbar sampai 2029 dan tidak ada pelanggaran organisasi. Kadin ini organisasi besar, ada aturan mainnya, bukan sekadar ajang deklarasi.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 153 / SATPOL.PP tanggal 29 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pasar Murah Di Halaman Kantor Ketahanan Pangan Rangkaian Peringatan Hut Ke 69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Antusias masyarakat terlihat tinggi saat memadati halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Adisucipto, Kamis 29 Januari 2026. Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar diserbu warga sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Dony Saiful Bahri, mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalbar ke-69 sekaligus menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Imlek dan bulan suci Ramadan.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 167 / SATPOL.PP tanggal 27 Januari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 27 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Upacra Bendera Di Halaman

Kantor Gubernur Rangkaian Peringatan Hut Ke 69 Dengan Inspektur Upacara Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus meneguhkan komitmen untuk bergerak maju bersama dalam membangun Kalimantan Barat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar menekankan pentingnya kebersamaan serta sinergi seluruh elemen dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan, perbatasan, pedalaman, dan pesisir. Capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan ke depan, sekaligus menjawab berbagai tantangan melalui penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi.

Momentum HUT ke-69 ini diharapkan menjadi semangat bersama untuk terus melangkah maju demi Kalimantan Barat yang semakin maju dan sejahtera. Yang dihadiri oleh forkominda, masyarakat yang berprestasi, olahragawan dan para pensiunan pemda.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 226 / SATPOL.PP tanggal 30 Januari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 30 Januari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Run Pemda Di Halaman Kantor Ketahanan Pangan Rangkaian Peringatan Hut Ke 69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, resmi meluncurkan Program Krida Olahraga ASN sebagai langkah membangun aparatur yang sehat jasmani, kuat rohani, dan siap memberikan pelayanan publik yang optimal. Gubernur menyampaikan bahwa kesehatan fisik dan spiritual harus berjalan seimbang agar ASN tetap bugar, berintegritas, dan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam melayani masyarakat Kalimantan Barat. Tak hanya olahraga bersama, program ini juga diimbangi penguatan keagamaan serta dukungan terhadap pangan lokal, seperti singkong, ubi, jagung, dan pisang rebus, sebagai bagian dari pola hidup sehat dan kebersamaan. Dengan semangat Mens Sana in Corpore Sano, ASN Kalbar diajak membangun lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan harmonis.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 259 / SATPOL.PP tanggal 05 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 05 Februari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pemprov Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Imlek, Bulan Suci Ramadhan, dan Idul Fitri 1447 H melalui strategi 4K: Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif. Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan pada hari besar keagamaan. Sementara itu, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya langkah konkret dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat jangka pendek, agar stabilitas harga dapat terjaga dengan baik. Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, serta seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Kalbar berkomitmen memastikan pasokan aman, harga tetap stabil, dan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

11. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 260 / SATPOL.PP tanggal 06 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 06 Februari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peresmian RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Sungai Raya Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Bersama Menkes Budi Gunawan, Gubernur Ria Norsan Kadinkes Prov Kalbar Meninjau Langsung Pembangunan RSUD Modern Tuan Besar Syarif Idrus Kubu Raya Bersama Menkes Budi Gunawan, Gubernur Ria Norsan Kadinkes Prov Kalbar Meninjau Langsung Pembangunan RSUD Modern Tuan Besar Syarif Idrus Kubu Raya

Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU, didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.,

melakukan peninjauan terhadap progres pembangunan gedung baru RSUD Tuan Besar Syarif Idrus di Kabupaten Kubu Raya, Gedung yang megah ini merupakan manifestasi dari janji pemerintah dalam memerangi "tiga pembunuh utama" di Indonesia: stroke, jantung, dan kanker. RSUD Syarif Idrus terpilih menjadi RS ke-10 dari target 66 rumah sakit tipe D yang dibangun atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Lokasinya yang berada di wilayah penyangga diharapkan mampu memangkas waktu emas (golden period) penanganan pasien darurat yang selama ini sering terkendala jarak dan biaya. Fokus utama rumah sakit ini adalah penanganan penyakit katastropik yang menjadi momok penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yakni stroke, jantung, dan kanker.

"Penyakit stroke, jantung, dan kanker adalah pembunuh nomor satu di Indonesia, oleh karena itu, saya instruksikan agar rumah sakit ini segera dilengkapi dengan fasilitas kelas satu, mulai dari CT Scan dan cath lab untuk jantung dan stroke, hingga layanan kemoterapi untuk kanker, agar pasien tidak perlu lagi dirujuk jauh-jauh ke ibu kota provinsi. Kita membawa layanan spesialis ke depan pintu rumah masyarakat," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dikatakannya, RSUD ini diharapkan beroperasi secara optimal di bulan Juni 2026. Dirinya menjanjikan pengadaan alat - alat kesehatan yang modern tersebut masuk pada bulan maret 2026.

Kehadiran fasilitas lengkap ini diharapkan dapat memutus rantai rujukan yang panjang dan melelahkan bagi pasien dari daerah pelosok. Namun, di tengah kemajuan pembangunan di Kubu Raya, Gubernur Ria Norsan membawa misi khusus. Ia melihat ketimpangan layanan masih membayangi warga di sisi timur Kalimantan Barat. Gubernur Ria Norsan secara diplomatis namun tegas secara strategis menyampaikan usulan tersebut kepada Menkes untuk mereplikasi model rumah sakit modern ini di Kabupaten Sintang sebagai pusat pelayanan bagi wilayah timur Kalimantan Barat. Hal ini bukan tanpa alasan, Ia mengusulkan kepada Menkes agar pola Barat, mencakup wilayah Kapuas Hulu, Melawi, dan Sekadau dan sekitarnya.

"Kami sangat bersyukur atas perhatian Bapak Presiden dan Pak Menkes melalui pembangunan RSUD di Kubu Raya ini yang sangat komprehensif fasilitasnya. Namun, di kesempatan ini, saya juga menyampaikan langsung usulan dan harapan masyarakat agar pembangunan rumah sakit dengan standar fasilitas secanggih ini juga bisa segera dibangun di Kabupaten Sintang. Sintang adalah titik sentral bagi kabupaten-kabupaten perhuluhan Kalbar, di sekitarnya seperti Kapuas Hulu, Melawi, dan Sekadau. Jika di Sintang ada rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab atau kemoterapi yang lengkap, ribuan warga di wilayah timur Kalbar tidak perlu lagi menempuh perjalanan darat hingga belasan jam menuju Pontianak. Ini adalah masalah efisiensi waktu yang sangat menentukan nyawa pasien kita. Kami ingin pemerataan ini nyata, sehingga warga di hulu juga merasakan kualitas layanan yang sama dengan yang ada di sini," pungkas Gubernur Ria Norsan.

12. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 274 / SATPOL.PP tanggal 09 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 09 Februari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peresmian Toko Rakyat Serba Ada Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Hadirnya Toko Rakyat Serba Ada (TORASERA) Abdussalam di Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu upaya mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Ritel lokal ini diharapkan mampu membuka ruang lebih luas bagi UMKM dan koperasi untuk berkembang serta meningkatkan daya saing produk daerah. Dengan konsep terpadu yang menggabungkan pusat belanja, kuliner, dan layanan pendukung, TORASERA menerapkan skema kemitraan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen mendorong kemandirian ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Ke depan, model pengembangan seperti TORASERA diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di daerah.

13. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 317 / SATPOL.PP tanggal 13 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 16 Februari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Perayaan Imlek di Gereja Katedral Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri perayaan malam Tahun Baru Imlek 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Hong Long Sie Ke/Marga Yo di Gedung Perkumpulan Marga Yo, Jalan Gajah Mada No. 21 Pontianak, Senin (16/2/2026), sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kalbar. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Imlek 2577. Mudah-mudahan Imlek tahun ini membawa keberkahan bagi masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya. Mari kita bersatu untuk Kalimantan Barat, rumah besar kita, mari kita majukan," ajaknya.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi yang telah menjadi kekuatan Kalimantan Barat.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa pada malam yang sama dirinya telah melepas pawai obor dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan. Obor melambangkan cahaya, lampion juga melambangkan cahaya. Jadi ada dua cahaya yang menyatu pada malam hari ini. Ini melambangkan bahwa masyarakat Tionghoa dan umat Muslim menjadi satu dalam persaudaraan, tidak ada lagi perbedaan yang membedakan kita,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan bahwa perayaan Imlek merupakan contoh nyata harmoni dan toleransi di Kalimantan Barat. Selamat Tahun Baru Imlek kepada masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat. Saya berdoa yang pertama sehat, yang kedua sukses, dan yang ketiga bahagia di Tahun Kuda Api,” ucap Krisantus. Ia menambahkan bahwa ribuan masyarakat dari berbagai etnis dan agama yang memadati Jalan Gajah Mada menjadi cerminan semangat kebersamaan masyarakat Kalimantan Barat. Kita lihat semua membaur dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Barat.

14. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 332 / SATPOL.PP tanggal 18 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 18 Februari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pak Gubernur Di Hotel Novotel Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Konsultasi publik tersebut dihadiri oleh Bupati Mempawah, Bupati Landak, kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Landak. Hadir pula pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta diikuti secara virtual oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pimpinan perusahaan di Jakarta Forum ini dinilai penting untuk memastikan bahwa Proyek Strategis Nasional selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan optimisme bahwa PSN yang masuk di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, akan membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah.

Namun demikian, Gubernur menekankan pentingnya perhatian terhadap dampak lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti tata ruang, dampak kawasan hutan, pengelolaan limbah, serta reklamasi dan reboisasi pascatambang. Kami mohon

perusahaan benar-benar memperhatikan hal ini. Selain aspek lingkungan, Norsan juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data ketenagakerjaan, dari sekitar 2,97 juta penduduk Kalbar yang bekerja, sektor pertanian masih mendominasi sebesar 41,44 persen. Sementara pekerja paruh waktu tercatat 27,67 persen dan setengah pengangguran sebesar 10,43 persen. Penduduk kita jangan hanya menjadi penonton, tetapi bisa menjadi pekerja terampil, bahkan manajer di perusahaan tersebut,” harap Norsan. Ia juga menambahkan bahwa proyek smelter aluminium ini tidak hanya dibangun di Mempawah dan Landak, tetapi juga telah berjalan di Pulau Penebah, Kabupaten Kayong Utara, dengan sumber bauksit berasal dari Kabupaten Ketapang dan Kayong sekitarnya.

Selain itu, pembangunan Smelter Aluminium oleh PT Indonesia Asahan Aluminium bersama mitranya di Kabupaten Mempawah juga diusulkan menjadi prioritas, termasuk pembangunan pembangkit listrik sebagai fasilitas pendukung operasional smelter yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), dan/atau badan usaha lainnya.

15. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 349 / SATPOL.PP tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 22 Februari 2026, Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik Di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengarahkan penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik di Kantor Gubernur pada Jumat (20/2/2026) pagi dengan menekankan penguatan fondasi transformasi pembangunan dan peningkatan daya saing daerah berbasis kinerja, inklusivitas, serta keberlanjutan. Kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini turut dihadiri Forkopimda, Sekda Prov. Kalbar, Harisson, Kepala Bapperida Prov. kalbar Linda Purnama, Kepala Baperida se-Kalbar, instansi juga perwakilan dari beragam latar belakang lainnya. Forum ini juga menjadi momentum yang sangat istimewa karena bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan pasangan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan periode 2025–2030.

Target harus tinggi agar ada upaya dan motivasi kuat untuk mencapainya. Jangan hanya mengejar angka aman secara administratif. Jadi kami juga mendorong misalnya di Ketapang, disalah satu perusahaan yang saat ini menerima tenaga kerja lulusan SD, SMP,

sehingga kita dorong untuk mengambil paket yang didukung melalui CSR. Juga misalnya update data di catatan sipil yang mana kadangkala si anak ini sudah tamat kuliah bahkan S2, tapi di Kartu Keluarga masih S1, bahkan masih pelajar SD/SMP/SMA," tegas Gubernur. Kemudian Norsan juga menyampaikan terkait implementasi program Desa Mandiri kini telah mencapai 51,07 persen sebagai bagian dari strategi pembangunan dari pinggiran. Pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Norsan–Krisantus. Di sektor kesehatan, untuk Usia Harapan Hidup masyarakat Kalbar kini mencapai 74,28 tahun.

16. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 384 / SATPOL.PP tanggal 26 Februari 2026. dilaksanakan pada, tanggal 26 Februari 2026, Dalam Rangka Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan pasar murah dan Buka Puasa Bersama di Masjid AL Hidayah Rasau Jaya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Dalam kunjungannya ke Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengajak seluruh elemen daerah untuk terus bersinergi mengoptimalkan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk dukungan bagi Masjid Al-Hidayah, sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan sosial dan keagamaan. Semangat Ramadan diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kubu Raya yang maju dan sejahtera.

Pesan yang disampaikan menjadi pengingat agar setiap langkah senantiasa berada di jalan kebaikan Momentum Ramadan ini menjadi ajakan untuk memanfaatkan sisa umur dengan memperbanyak amal ibadah dan memperkuat iman serta takwa, sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi.

C. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kewaspadaan Dini, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 02 /SATPOL.PP-B tanggal 2 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Jum'at, 02 Januari 2026 Dalam Rangka Deteksi Dini Situasi dan Kondisi yang Berpotensi Rawan Gangguan Trantibum Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada kegiatan kenakalan anak remaja di Kota Pontianak Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Terjaminnya Keamanan dan Ketenteraman: Masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut atau khawatir akan gangguan keamanan, kekerasan, atau pelanggaran hukum;
- Kehidupan Sosial yang Kondusif: Terciptanya suasana yang harmonis dan kondusif untuk interaksi sosial, pembangunan, dan pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan, baik fisik, ekonomi, sosial, maupun politik.
- Penegakan Hukum dan Keadilan: Segala sesuatu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan sistem peradilan yang independen dan penegakan hukum yang etis, memastikan hak dan kewajiban setiap individu dihormati.
- Perlindungan Hak dan Kebebasan Individu: Terjaminnya pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta terpenuhinya tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama.
- Lingkungan yang Teratur: Kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menaati rambu lalu lintas, atau mematuhi zonasi bangunan, yang menghasilkan lingkungan hidup yang lebih baik.
- Pembangunan Nasional yang Efektif: Kondisi masyarakat yang tertib dan aman menjadi landasan dasar bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- Jalan yang di lalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Letjend Sutoyo, Jalan Purnama Jalan Harapan Jaya, Jalan Ampera, Jalan Ujung Pandang 2, Jalan Doktor Wahidin S, Jalan Pangeran Natakusuma, Jalan Putri Canda Midi Jalan Sutan Abdulrahman, Jalan Ahmad Yani Langsung Masuk Kantor Gubernur situasi aman.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 39 /SATPOL.PP-B tanggal 9 Januari 2026. dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada kegiatan kenakalan anak remaja di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Terjaminnya Keamanan dan Ketenteraman: Masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut atau khawatir akan gangguan keamanan, kekerasan, atau pelanggaran hukum. Kehidupan Sosial yang Kondusif: Terciptanya suasana yang harmonis dan kondusif untuk interaksi sosial, pembangunan, dan pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan, baik fisik, ekonomi, sosial, maupun politik. Penegakan Hukum dan Keadilan: Segala sesuatu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan sistem peradilan yang independen dan penegakan hukum yang etis, memastikan hak dan kewajiban setiap individu dihormati. Perlindungan Hak dan Kebebasan Individu: Terjaminnya pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta terpenuhinya tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama.

Lingkungan yang Teratur: Kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menaati rambu lalu lintas, atau mematuhi zonasi bangunan, yang menghasilkan lingkungan hidup yang lebih baik. Pembangunan Nasional yang Efektif: Kondisi masyarakat yang tertib dan aman menjadi landasan dasar bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Jalan Yang Di Lalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Parit Bugis, Jalan Adi Sucipto, Jalan Kh Abdulrahman Wahid, Jalan Sultan Agung Rasau Jaya Dan Balik Kanan Jalan Sultan Agung, Jalan Kh Abdulrahman Wahid, Jalan Arteri Supadio, Jalan Ahmad Yani Langsung Masuk Kantor Gubernur situasi aman. Terpantau masyarakat banyak yang santai menikmati malam minggu di pelabuhan rasau jaya yang sekarang di buat tempat untuk santai dan di daerah simpang tugu pesawat yang sekarang dibuat/di ijinakan oleh kepala daerah untuk hiburan masyarakat.

Pada kegiatan kenakalan anak remaja di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda dan Pergub Sebagai Tindak Lanjut penertiban melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dalam rangka deteksi dini potensi gangguan trantibum di kota pontianak berjalan dengan aman dan lancar.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 78 / SATPOL.PP-B tanggal 15 Januari 2026. dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Sekitaran Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

- a. Hasil pantauan dilapangan, beberapa warung kopi dan kafe di Kota Pontianak yang jam operasionalnya 24 jam;
 - b. Selain menyediakan makanan dan minuman, warung kopi dan kopi menyediakan live music untuk menghibur pengunjung hingga pukul 22.00 wib;
 - c. Pengunjung warung kopi dan kafe rata-rata didominasi anak remaja muda-mudi mahasiswa dan pelajar hingga larut malam.
 - d. Hingga kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan.
4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 79 / SATPOL.PP-B tanggal 15 Januari 2026. dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum di Sekitaran Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

- a. Hasil pantauan dilapangan, beberapa warung kopi dan kafe di Kota Pontianak yang jam operasionalnya 24 jam;
- b. Selain menyediakan makanan dan minuman, warung kopi dan kopi menyediakan live music untuk menghibur pengunjung hingga pukul 22.00 wib;
- c. Pengunjung warung kopi dan kafe rata-rata didominasi anak remaja muda-mudi mahasiswa dan pelajar hingga larut malam.
- d. Hasil temuan dilapangan, selain menyediakan live music ada juga disc jockey pada sebuah kafe di Kota Pontianak dan menyajikan minuman beralkohol.
- e. Patroli wilayah yang di lalui Jalan Ayani- Jalan Perdana- Jalan Karya Baru- Purnama Agung 5- Jalan Purnama- Jalan Parit Demang- Purnama Madya- Jalan Surya - Jalan sumatera- Jalan karya bhakti- Jalan sulawesi- Jalan sutan syahrir- Jalan seram 1- Jalan timor- Jalan lombok- Jalan Pak benceng- Jalan Danau Sentarum Jjalan Petani-

Jalan Ujungpanjang- Jalan H.Rais A. Rahman- Jalan Merdeka- Jalan Cendrawasih- Jalan Jend urip- Jalan Sudirman- Jalan Tanjungpura- waterfront barito - Jalan Imam Bonjol- Jalan Daya Nasional- Kantor Gubernur.

f. Hingga kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 160 / SATPOL.PP-B tanggal 26 Januari 2026. dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Terkait Kebakaran Hutan Dan Lahan Karhutla di Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Dalam rangka menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat selama musim kemarau ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memperkuat koordinasi lintas sektor dan respons cepat di lapangan. Langkah cepat harus segera dilakukan, termasuk pengerahan helikopter untuk water bombing, percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan mobilisasi seluruh potensi sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemadaman

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menko Polkam guna memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan karhutla, menyusul meningkatnya jumlah titik panas di provinsi ini. di berbagai kabupaten, dengan peningkatan signifikan di Sanggau, Sintang, dan terutama Kabupaten Mempawah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun telah menetapkan status Siaga Darurat sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor. Lebih lanjut, kegiatan pemantauan diawali dengan koordinasi bersama BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh aksi pembakaran lahan oleh pihak luar desa. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan.

Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan ilegal, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku, serta penerapan strategi terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam pengendalian karhutla. Penanganan tidak boleh sekadar reaktif, namun harus melibatkan sinergi antarlembaga, kesiapsiagaan masyarakat, serta dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 222 / SATPOL.PP-B tanggal 30 Januari 2026. dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Isra' Mi 'Raj 1447 H Di Masjid An Na' Im Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama ASN Pemprov Kalbar, Gubernur Ria Norsan menegaskan kembali esensi shalat sebagai fondasi spiritual dalam kehidupan, termasuk di tengah kesibukan melayani masyarakat. Seluruh ASN diajak untuk tidak melalaikan shalat lima waktu, karena dari sanalah disiplin, keikhlasan, dan integritas bermula.

Sesibuk apa pun aktivitas, panggilan azan adalah pengingat untuk sejenak berhenti dan kembali kepada -Nya. Melalui peringatan Isra Mi'raj, semoga nilai-nilai spiritual semakin menguatkan komitmen dalam bekerja dan mengabdikan secara tulus Yang Di Sampai Oleh Ustad Habib Umar Bin Hasim Alkari, S Pd.I Di Masjid An Na'im Komplek Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 315 / SATPOL.PP-B tanggal 13 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pawai Kendaraan Dalam Rangka Festival Pawai Obor Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan peserta ambil bagian dalam pawai dan lomba kendaraan hias yang digelar dalam rangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadan di Kota Pontianak. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Orang Melayu (POM) Pontianak, Hasmi Abdul Razak, mengatakan kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan suasana menjelang Ramadan sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Hasmi menyebutkan, jumlah peserta yang ikut ambil bagian hampir mencapai belasan kendaraan hias. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat. Pesertanya

hampir 100 lebih. Ada dari komunitas, pemadam kebakaran, dewan remaja masjid, majelis taklim, kelompok pengajian, hingga para remaja yang turut meramaikan kegiatan ini,” jelasnya. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda tahunan yang dinanti warga sebagai penanda datangnya bulan suci, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi di Kota Pontianak.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 316 / SATPOL.PP-B tanggal 13 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pawai Obor Di Halaman Masjid Mujahidin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Ribuan umat Islam dari berbagai usia berjalan bersama, membawa obor mereka menyusuri rute Pawai Obor Akbar 2026 dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pawai dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang hadir bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua TP PKK Kalbar Erlina Ria Norsan, Ketua POM Kalbar Agus Setiadi, para tokoh agama, serta perwakilan kepala OPD. Ribuan peserta memulai perjalanan dari halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak menuju Bundaran Digulis dan kembali lagi ke masjid sebagai titik akhir pawai. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyoroti nilai toleransi yang tersirat dalam pawai malam itu. Menurutnya, kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan malam pergantian Tahun Baru Imlek, menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Ini adalah kegiatan budaya, keagamaan, dan religi. Pawai Obor Akbar 2026 bukan sekadar ajang syiar keagamaan

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 343 / SATPOL.PP-B tanggal 19 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Semarak Rupiah Di Halaman Masjid Mujahidin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendukung penuh program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang

digelar Bank Indonesia. Ia menegaskan, program ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari kebijakan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Terutama menjelang hari raya, stabilitas ekonomi harus dijaga,” ujarnya, usai membuka kick-off SERAMBI 2026 yang dirangkai dengan National Halal Fair Kalbar 2026 di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, program SERAMBI membuktikan peran strategis Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Ia optimistis ekonomi Kalbar tahun ini tumbuh 5,5–6 persen. Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya memastikan dukungan likuiditas telah disiapkan. Alokasi uang kartal meningkat dari Rp2,6 triliun menjadi Rp3,6 triliun, didominasi pecahan kecil. BI membuka layanan penukaran di 70 titik, mulai dari kas keliling ritel, layanan terpadu, hingga susur sungai. Program kolaborasi juga menghadirkan layanan publik seperti SIM keliling dan pasar murah hingga Maret. Sebanyak 14.000 paket bantuan akan disalurkan ke seluruh wilayah Kalbar.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 344 / SATPOL.PP-B tanggal 19 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Bazar Ramadhan Di Halaman Masjid Mujahidin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Bazar Ramadan Mujahidin 1447 Hijriah bertempat di Halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis (19/2/2025), dibuka oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Alfian, M.M., mewakili Gubernur Kalbar, didampingi Wali Kota Pontianak dan Direktur Utama Bank Kalbar. Dalam sambutannya, Alfian mengatakan bahwa Ramadan bukan hanya momentum peningkatan ibadah spiritual, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah serta kepedulian sosial. Ramadan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian umat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, kehadiran Bazar Ramadan ini memiliki makna yang sangat strategis yaitu wadah silaturahmi, sarana promosi produk lokal, serta momentum untuk mengangkat dan memberdayakan UMKM Kalimantan Barat,” ujarnya. Bazar Ramadan Mujahidin 1447 H diikuti oleh 166 stan, yang terdiri atas 108 stan di dalam tenda utama, 27 stan di luar tenda, serta 30 stan khusus bagi pelaku UMKM.

11. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 350 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Warga Kota Pontianak berbondong-bondong memadati Pasar Juadah Yang Berada di Kota Pontianak, antusiasme masyarakat tidak surut. Menariknya, pada hari pertama ini hampir setengah transaksi dilakukan menggunakan QRIS. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi transaksi di sektor UMKM.

Kondisi ini disambut positif oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Ia mengapresiasi geliat Pasar Juadah yang kembali hidup dan tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak. Kita bersyukur karena kegiatan ini sudah menjadi tradisi setiap Ramadan. Hampir seluruh titik Pasar Juadah dipadati pedagang dan pembeli yang ingin meraih berkah Ramadan melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Ia juga mengimbau para pedagang agar menyajikan makanan yang berkualitas serta menjaga kebersihan dan kesehatan produk yang dijual. Pasar juadah ini menunjukkan semangat masyarakat dalam mengambil berkah Ramadan. Bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga pahala yang berlipat,” pungkasnya.

12. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 351 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Kegiatan patroli dilaksanakan pada tanggal 20 feb 26 mulai pukul 22.00 wib hingga 23.30 wib di pimpin oleh Plt.Kasi Wasdini dengan personil berjumlah 5 orang.
- Lokasi patroli melewati jalan A Yani - Jl. Sutoyo - Jl. M.Sohor- Jl. Sutan Abdurahman- Jl. Uray Bawadi- Jl. P.NatakusumaJl. Dr.Wahidin-Husein Hamzah- Jl. Tabrani Ahmad- Jl. Tebu-Jl. Koyoso - Jl.

Khw.Hasyim- Jl. Johar- Jl. K.H. Ahmad Dahlan- Jl. Teuku Umar- Jl. Gusti Sulung Lelanang- Jl. WR.Supratman- Jl. Gajahmada- Jl.Budi Karya- Jl. Imam Bonjol- Jl. Daya Nasiaonal kembali Kantor Satpol PP Prov Kalbar.

- Hasil pemantauan dilapangan masih ditemukan warung kopi atau kafe yang tetap beroperasi pada bulan suci ramadan dan masih ramai pengunjung
- Berdasarkan Penumuman Walikota Pontianak no 430 th 2026 ttg Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Bulan Suci Ramadan, Diskotik dan Klub Malam tutup 1 bulan penuh selama ramadan, hasil pantauan dilapangan tidak ditemukan diskotik dan klub malam yang beroperasi,
- Tidak ditemukan juga cafe yang biasanya menyediakan live musik, selama bulan suci ramadan tidak lagi menyetel musik.
- Untuk kareoke dan bilyard ditemukan masih beroperasi dan masih ramai pengunjung
- Hingga pelaksanaan patroli selesai tidak ditemukan gangguan trantibum.
- Kegiatan patroli selesai pukul 23.30 wib, personil kembali ke kediaman masing2 persiapan melaksanakan sahur bersama keluarga

13. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 352 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Warga Kota Pontianak berbondong-bondong memadati Pasar Juadah Yang Berada di Kota Pontianak, antusiasme masyarakat tidak surut. Menariknya, pada hari pertama ini hampir setengah transaksi dilakukan menggunakan QRIS. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi transaksi di sektor UMKM.

Kondisi ini disambut positif oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Ia mengapresiasi geliat Pasar Juadah yang kembali hidup dan tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak. Kita bersyukur karena kegiatan ini sudah menjadi tradisi setiap Ramadan. Hampir seluruh titik Pasar Juadah dipadati pedagang dan pembeli yang ingin meraih berkah Ramadan melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Ia juga mengimbau para pedagang agar menyajikan makanan yang berkualitas serta

menjaga kebersihan dan kesehatan produk yang dijual. Pasar juadah ini menunjukkan semangat masyarakat dalam mengambil berkah Ramadan. Bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga pahala yang berlipat,” pungkasnya.

14. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 353 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan patroil pengawasan pada bulan Ramadhan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- Kegiatan patroli dilaksanakan pada tanggal 20 feb 26 mulai pukul 22.00 wib hingga 23.30 wib di pimpin oleh Plt.Kasi Wasdini dengan personil berjumlah 5 orang.
- Lokasi patroli melewati jalan A Yani - Jl. Sutoyo - Jl. M.Sohor- Jl. Sutan Abdurahman- Jl. Uray Bawadi- Jl. P.NatakusumaJl. Dr.Wahidin-Husein Hamzah- Jl. Tabrani Ahmad- Jl. Tebu-Jl. Koyoso - Jl. Khw.Hasyim- Jl. Johar- Jl. K.H. Ahmad Dahlan- Jl. Teuku Umar- Jl. Gusti Sulung Lelanang- Jl. WR.Supratman- Jl. Gajahmada- Jl.Budi Karya- Jl. Imam Bonjol- Jl. Daya Nasiaonal kembali Kantor Satpol PP Prov Kalbar.
- Hasil pemantauan dilapangan masih ditemukan warung kopi atau kafe yang tetap beroperasi pada bulan suci ramadan dan masih ramai pengunjung
- Berdasarkan Penumuman Walikota Pontianak No. 430 Tahun 2026 Tentang Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Bulan Suci Ramadan, Diskotik dan Klub Malam tutup 1 bulan penuh selama ramadan, hasil pantauan dilapangan tidak ditemukan diskotik dan klub malam yang beroperasi,
- Tidak ditemukan juga cafe yang biasanya menyediakan live musik, selama bulan suci ramadan tidak lagi menyetel musik.
- Untuk kareoke dan bilyard ditemukan masih beroperasi dan masih ramai pengunjung
- Hingga pelaksanaan patroli selesai tidak ditemukan gangguan trantibum.
- Kegiatan patroli selesai pukul 23.30 WIB, personil kembali ke kediaman masing2 persiapan melaksanakan sahur bersama keluarga

15. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 354 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Warga Kota Pontianak berbondong-bondong memadati Pasar Juadah Yang Berada di Kota Pontianak berdatangan untuk berburu takjil dan menu berbuka puasa dari ratusan pedagang yang berjajar rapi di kawasan Jalan Kota Pontianak.

Salah seorang pedagang, Selfi (23), mengaku telah datang sejak pukul 11.00 WIB untuk bersiap membuka lapak. Pengunjung mulai berdatangan sekitar dua jam kemudian. Warga Sungai Raya Dalam ini sudah beberapa tahun berjualan di Pasar Juadah Masjid Raya Mujahidin dan merasakan langsung peningkatan omzet setiap awal Ramadan. "Ini hari pertama sudah ramai. Memang di awal-awal puasa selalu penuh," ujarnya.

Selfi merupakan satu dari 108 pedagang yang telah membuka lapak di area Pasar Juadah. Masih ada sejumlah lapak lain yang belum beroperasi. Dalam sepekan ke depan, UMKM dan komunitas di seluruh tenda dijadwalkan akan membuka gerai mereka secara penuh. Ia menjual aneka kue titipan, sebagian dibuat sendiri oleh keluarganya di rumah. Menariknya, pada hari pertama ini hampir setengah transaksi dilakukan menggunakan QRIS.

16. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 355 / SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2026. dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

- a. Kegiatan deteksi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 26 mulai pukul 22.00 WIB hingga 23.30 WIB di pimpin oleh Plt. Wasdini dengan personil berjumlah 5 orang.
- b. Lokasi deteksi dini di beberapa wilayah kota Pontianak diantaranya:
 - Cafe Ente di Jl. Komyos Sudarso
 - CW Coffee di Jl. Kom Yos Sudarso

- Warkop Milenial di Jl. Kom Yos Sudarso
 - Ray's Kopi Tiam di Jl. Tebu
 - CW Coffee di Jl. Husein Hamzah
 - Daliso Cafe di Jl. Ampera
 - CW Coffee di Jl. Danau Sentarum
- c. Hasil pemantauan dilapangan masih ditemukan warung kopi atau kafe yang tetap beroperasi pada bulan suci ramadan hingga 24 jam
 - d. Diskotik dan Klub Malam tutup 1 bulan penuh selama ramadan
 - e. Hingga pelaksanaan patroli selesai tidak ditemukan gangguan trantibum.
 - f. Kegiatan deteksi dini selesai pukul 23.30 wib, personil kembali ke kediamming2 persiapan melaksanakan sahur bersama keluarga.
17. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 407 / SATPOL.PP-B tanggal 03 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Pada Kegiatan Perayaan Cap Go Meh Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Salah satu ikon paling dinanti dalam perayaan Cap Go Meh di Kota Pontianak adalah parade Naga Bersinar. Replika naga beraneka panjang yang dipenuhi lampu warna-warni dan berjalan megah di malam puncak perayaan. Tradisi ini telah menjadi identitas Cap Go Meh Kota Khatulistiwa. Sejak beberapa tahun terakhir, Naga Bersinar menjadi simbol festival yang digelar setiap tahun untuk menutup rangkaian Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh. Pada perayaan tahun sebelumnya, Cap Go Meh 2576/2025, puncak acara parade menampilkan 39 replika naga yang memukau ribuan penonton sepanjang Jalan Gajah Mada. Tahun ini, perayaan Cap Go Meh 2577 Kongzili kembali digelar di Pontianak dengan sejumlah agenda yang sudah dimulai sejak 25 Februari 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan Pekan Promosi dan Kuliner di Jalan Diponegoro yang menampilkan 55 stan kuliner dan produk lokal.

Kemudian dilanjutkan dengan ritual buka mata bagi naga-naga yang akan tampil. Prosesi itu dijadwalkan berlangsung pada 1 Maret 2026 di Klenteng Kwang Tie Bio, Jalan Diponegoro Pontianak. Parade Naga Bersinar tahun ini akan menampilkan 49 kelompok naga pada 3 Maret

2026 di sepanjang Jalan Gajah Mada. Naga terpanjang mencapai 118 meter, sedangkan yang terpendek sekitar 20 meter. Semua merupakan hasil kreasi masyarakat. "Kegiatan karnaval dijadwalkan dimulai pukul 21.00 WIB hingga batas waktu pukul 02.00 WIB," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai Rapat Koordinasi Harkamtibmas Jelang Cap Go Meh 2026 di Polresta Pontianak. Masyarakat yang ingin menyaksikan karnaval naga diimbau agar menjaga ketertiban, tetap berada di area yang telah disediakan. Mereka juga diminta memberikan ruang yang cukup bagi naga untuk melintas agar tidak menghambat jalannya atraksi. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan batas waktu tersebut diterapkan untuk menghormati bulan suci Ramadan. Demi kelancaran, 49 grup naga juga diminta mematuhi tata tertib yang telah disepakati. Sebagai contoh, apabila dalam perjalanan dari posko menuju lokasi acara mereka menabuhkan genderang, maka sesuai kesepakatan, grup tersebut siap untuk dikandangkan di Polresta. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan kegiatan belum selesai, maka akan kami hentikan," tegasnya. Kapolresta mengatakan, di setiap grup naga telah ditunjuk perwira pengendali beserta anggota yang akan mendampingi.

Hal itu dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai waktu yang telah disepakati. "Mohon hal ini dapat dipahami bersama, mengingat saat ini berada di bulan suci Ramadan. Untuk pelaksanaan di luar Ramadan, tentu pengaturannya tidak seperti ini. Terkait pengamanan dan pengelolaan parkir, sudah ditetapkan titik-titik lokasi. Di antaranya di area gedung parkir, dan beberapa kantong parkir di sekitar Jalan Diponegoro dan Jalan Gajah Mada. Kami mengimbau kepada seluruh warga agar tidak memaksakan parkir di lokasi yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas," tutupnya.

18. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 433 / SATPOL.PP-B tanggal 06 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Pada Kegiatan Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke XI Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Barat akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI pada Sabtu, 7 Maret 2026

di Hotel Golden Tulip Pontianak. Musda tersebut menjadi forum penting bagi Partai Golkar di Kalbar untuk menentukan arah organisasi ke depan sekaligus memilih Ketua DPD yang baru.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan pelaksanaan Musda XI merupakan tindak lanjut dari surat resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menetapkan jadwal Musda pada 7 Maret 2026. Terkait pencalonan Ketua DPD Golkar Kalbar, Prabasa menyebut prosesnya terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi persyaratan. Ia menambahkan, sejumlah kader disebut memiliki potensi untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Kalbar. Namun hingga saat ini proses komunikasi dan penjajakan masih berlangsung menjelang pelaksanaan Musda. Kalau kader di Golkar tentu banyak yang berpotensi. Semua kader memiliki hak untuk mendaftar, nanti kita lihat perkembangan besok,” ucap Prabasa

19. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 434 / SATPOL.PP-B tanggal 06 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peingatan Malam Nuzul Qur Anbersama Ustad Adas'at Latifdi Masjid Al Muhtadin Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

Ustadz Das'ad Latif menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat agar menjaga integritas dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk tidak menerima praktik “serangan fajar” dalam proses pemilu. Kegiatan pengajian ini berlangsung dengan penuh khidmat dan antusiasme dari para peserta. Setelah tausiyah, acara dilanjutkan buka puasa bersama yang diikuti oleh civitas akademika dan para tamu undangan. Pada Kegiatan Peingatan Malam Nuzul Qur Anbersama Ustad Adas'at Latifdi Masjid Al Muhtadin Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

20. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 473 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Arus Mudik Idul Fitri 1447 H Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Menegaskan pentingnya pengendalian harga tiket transportasi sungai menjelang arus mudik Lebaran. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan arus transportasi di Dermaga KTM Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Selasa, 17 Maret 2026. Dalam peninjauan tersebut, kondisi tarif angkutan kapal penumpang jenis klotok atau bandong masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan. Untuk kapal penumpang seperti klotok ini masih normal, sebelumnya Rp90 ribu dan sekarang tetap Rp90 ribu. Alhamdulillah tidak ada kenaikan.

Namun demikian adanya kenaikan tarif pada transportasi speedboat yang mencapai sekitar 30 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peralihan penggunaan bahan bakar dari BBM subsidi ke non-subsidi akibat keterbatasan pasokan. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perhubungan segera mengeluarkan surat rekomendasi agar para pengusaha speedboat dapat kembali mengakses BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan segera keluarkan rekomendasi. Kalau bisa hari ini, keluarkan hari ini supaya distribusi BBM subsidi bisa kembali berjalan dan harga tiket kembali normal, agar proses penerbitan rekomendasi dilakukan secara hati-hati dan diawasi dengan ketat guna menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Negara harus hadir dalam situasi seperti ini. Kita harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi dengan harga yang wajar.

21. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 474 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Arus Mudik Gratis Idul Fitri 1447 H pakai kendaraan Bus Di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Wakil Gubernur Kalimantan Barat melepas 1.210 peserta program Mudik Gratis Khatulistiwa 2026 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Rabu pagi (18/3). Acara pelepasan itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, serta instansi terkait seperti Jasa Raharja dan Damri. Sebanyak 1.210 pemudik diberangkatkan menggunakan bus Damri menuju 12 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi

masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menjelang Idulfitri. Krisantus menyampaikan bahwa program tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Forkopimda dalam memberikan layanan transportasi yang aman bagi masyarakat. Selain melepas peserta mudik, Wakil Gubernur juga menyoroti isu ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina dan PLN Wilayah Kalbar, ia memastikan stok BBM dan pasokan energi dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Lebaran. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadaai potensi penyimpangan di lapangan.

Saya minta aparat penegak hukum bertindak tegas. Tidak ada kompromi terhadap oknum yang bermain dengan BBM dan gas 3 kilogram yang merugikan masyarakat,” tegasnya. Ia berharap program Mudik Gratis Khatulistiwa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan pelepasan ditandai dengan penyerahan simbolis paket perbekalan kepada peserta, kemudian dilanjutkan dengan pengawalan bus oleh jajaran Ditlantas Polda Kalbar guna memastikan keamanan perjalanan para pemudik.

23. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 475 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Sholat Idul Fitri 1447 H Muhammadiyah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) bersama Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan ketat serta pengaturan lalu lintas dalam rangka ibadah Sholat Idul Fitri jemaah Muhammadiyah yang melaksanakan perayaannya pada hari ini. Kegiatan ibadah yang dipusatkan di Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jalan Ahmad Yani sampai dengan Jalan Muhammad Sood, Kota Pontianak ini terpantau dipadati ribuan jemaah sejak pukul 06.00 WIB.

Fokus utama adalah memastikan Jemaah dapat beribadah dengan tenang tanpa merasa khawatir akan keamanan kendaraan maupun gangguan arus lalu lintas. Sinergi personel di lapangan bertujuan untuk

meminimalisir titik hambat di bahu jalan, Ujar Bambang. Pengamanan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat yang merayakan hari besar keagamaan di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Hari ini Personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Kapuas 2026 telah digelar di titik-titik pusat keramaian ibadah, salah satunya di Perguruan Muhammadiyah Pontianak. Kami mengedepankan pendekatan preventif dan pengaturan lalu lintas yang dinamis agar aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan lancar tanpa mengganggu kekhusyukan saudara-saudara kita yang melaksanakan Sholat Ied. Hingga rangkaian ibadah selesai, arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Muhammad Sood kembali normal dan tertib.

24. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 476 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Malam Takbiran Idul Fitri 1447 H Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Kemenag Kalbar turut serta dalam kegiatan zoom meeting pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) malam takbiran yang dipimpin oleh Kapolri bersama para menteri serta kepala lembaga terkait, Jumat, 20 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Pos Pengamanan Masjid Mujahidin Pontianak dan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, di antaranya Kapolda Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura, pejabat Pemerintah Provinsi Kalbar, Forkopimda Kalbar, Wali Kota Pontianak, Kapolresta Pontianak, serta Dandim Pontianak. Mewakili Kanwil Kemenag Kalbar Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), Mi'rad. Kehadiran Kemenag dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung terciptanya suasana malam takbiran yang aman, tertib, dan penuh kekhidmatan. Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen, baik TNI-Polri, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga, dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama momentum Idulfitri, khususnya pada malam takbiran yang identik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sejalan dengan itu, partisipasi Kemenag juga diarahkan untuk mengimbau masyarakat agar mengisi malam takbiran dengan kegiatan yang lebih religius dan kondusif, seperti takbiran di

masjid dan mushala, serta menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kakanwil Kemenag Kalbar Dr. Muhajirin Yanis menyampaikan bahwa Kemenag Kalbar siap bersinergi dengan seluruh pihak dalam menjaga suasana yang aman dan damai. "Momentum malam takbiran hendaknya menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan, bukan sebaliknya menimbulkan potensi gangguan kamtibmas. Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin solid dalam memastikan perayaan Idulfitri di Kalbar berlangsung dengan aman, nyaman, dan penuh keberkahan.

25. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 486 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Festival Meriam Karbit Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

Hasil Kegiatan :

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bilang, eksibisi meriam karbit tahun ini terasa istimewa karena adanya perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriyah antara pemerintah pusat dan Muhammadiyah. Dentuman meriam ini menjadi penanda berakhirnya Ramadan dan kita menyambut Idulfitri. Tadisi meriam karbit sendiri telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pontianak. Bahkan, pada tahun 2016, tradisi ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Kota Pontianak pun terus berupaya menjaga dan melestarikannya sebagai ikon budaya daerah. Lebih dari sekadar hiburan, permainan meriam karbit mengandung filosofi mendalam tentang kebersamaan dan gotong royong.

Pada tahun ini, tercatat sebanyak 229 meriam karbit turut serta dalam kegiatan tersebut, dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki diameter lebih dari 80 sentimeter dan terbuat dari kayu gelondongan yang disimpan di dalam air untuk menjaga kualitasnya. Tradisi ini berkembang di sepanjang Sungai Kapuas dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat setempat. Sejak dahulu, dentuman meriam karbit telah menjadi penanda datangnya 1 Syawal, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak berharap tradisi ini tidak hanya tetap lestari, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi

masyarakat. Melalui pengemasan yang lebih menarik dan atraktif, meriam karbit diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menjelaskan, pelaksanaan kegiatan Eksibisi Meriam Karbit tahun ini tersebar di 42 titik lokasi dengan jumlah keseluruhan 229 meriam karbit. Meski pembukaan eksibisi dipusatkan di Jalan Adi Sucipto Gang Darsyad Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, namun permainan ini tersebar di tepian Sungai Kapuas di Kecamatan Pontianak Selatan, Tenggara dan Timur. Untuk lokasi eksebisi, tersebar di 42 titik di sepanjang tepian Sungai Kapuas yang meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Timur. Eksibisi Permainan Rakyat Meriam Karbit 2026 di Pontianak resmi dibuka pada 19 Maret 2026, menyemarakkan malam takbiran dengan 229 balok meriam di sepanjang Sungai Kapuas. Gubernur Kalbar yang diwakili Kadispora, Drs. H. Sugeng Hariadi, M.M., membuka acara ini sebagai upaya pelestarian budaya Melayu.

26. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 487 / SATPOL.PP-B tanggal 17 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Open House Hari Raya Idul Fitri 1447 H Di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Hari lebaran Ketiga, pukul 09.00 WIB, masyarakat dari berbagai kalangan mulai berdatangan untuk menghadiri open house yang digelar sebagai ajang silaturahmi di Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Tamu yang hadir tidak hanya berasal dari kalangan pejabat daerah, Forkopimda, tetapi juga masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Para tamu disambut langsung oleh Sekda Harisson didampingi istri, Windy yang juga sebagai Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat bersama keluarga dengan penuh keakraban, saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan dalam suasana yang sederhana namun sarat makna. Harisson mengungkapkan bahwa open house ini merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, Idulfitri ini momentum untuk mengajak masyarakat agar saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi serta persaudaraan dalam rangka membangun Kalimantan Barat

tercinta. Mudah-mudahan momentum Idulfitri tidak hanya menjadi ajang merayakan kemenangan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat warga untuk saling berbagi dan saling memaafkan. Ia juga menambahkan bahwa tradisi open house menjadi wadah untuk mendengar langsung aspirasi warga dalam suasana yang lebih santai dan penuh kekeluargaan. kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan.

27. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1/ 498 / SATPOL.PP-B tanggal 25 Maret 2026. dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Antisipasi Potensi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Hasil Kegiatan :

Pada tanggal 26 Maret 2026. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Sepakat II, Komplek Sepakat Asri Residence, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (25/03) sekitar pukul 15.00 WIB. Api yang sempat membesar di lahan kosong membuat warga sekitar panik dan berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali diketahui sudah membesar di lahan semak belukar di depan permukiman warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera saling memberi tahu dan bergotong royong memadamkan api sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, tim pemadam kebakaran Kota Pontianak tiba di lokasi dan bersama warga berjibaku memadamkan api serta melokalisir titik kebakaran agar tidak merambat ke rumah warga. Sekitar pukul 16.00 WIB, api berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman serta terkendali. kesigapan warga dalam membantu proses pemadaman. Diketahui, lahan yang terbakar berukuran kurang lebih 20 x 50 meter dengan kondisi semak belukar dan tanah gambut, sehingga cukup sulit dipadamkan. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. akan terus meningkatkan patroli serta koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Hingga kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan.

D. Melaksanakan Pendataan Terkait Permintaan Peta Data Rawan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/2/Seksi Binlul Satpol PP Prov Kalbar-A tgl 13 Januari 2026 hal telah melakukan koordinasi terkait permintaan data peta rawan trantibum kepada Satpol PP di 14 Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya pencegahan **ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan)**
2. Hasil dari permintaan data peta rawan trantibum terdapat berapa kabupaten kota yang sudah melampirkan, sebagai berikut :
 - Kabupaten Kapuas Hulu
 - Kabupaten Sekadau
 - Kabupaten Sintang
 - Kabupaten Sanggau
 - Kota Singkawang
 - Kabupaten Ketapang
 - Kabupaten Kayong Utara

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	197.920.700,-	57.777.615,-	29,19 %

Sumber data : SIPD

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2026 sebesar Rp. 197.920.700,- dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 57.777.615,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) atau sebesar 29,19 %. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 1 (satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima) persen.

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi


- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2026, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.


Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19820814 200604 2 009

Pontianak, 01 April 2026

Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,


Wahyudin Nusa Gunawan, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19740425 200701 1 013

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN





**SURAT PERMINTAAN INFORMASI PETA RAWAN GANGGUAN TRANTIBUM
MENGETAHUI SEKDA, TERKAIT ANTISIPASI (ATHG – ANCAMAN,
TANTANGAN, HAMBATAN, DAN GANGGUAN)**

TERLAMPIR



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 13 Januari 2026

Nomor : 300.1/2/Seksi Binluh Satpol PP Prov Kalbar-A
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Rawan Trantibum

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota Se- Kalimantan Barat

di
Tempat

Dalam rangka menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Pasal 3, ayat (1) bahwa Satpol PP menyelenggarakan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota, ayat (4) huruf a, deteksi dan cegah dini, dan ayat (5) bahwa Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi dan antar Satpol PP Provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat agar dapat menginformasikan dan melaporkan situasi tersebut melalui tautan <https://bit.ly/datarawanDaerahKalbar> paling lambat tanggal 31 Januari 2026.
3. Informasi lebih lanjut mengenai pengisian data dapat disampaikan kepada Narahubung Saudara Erfan Yussandi, S.E. (HP/WA085347903389).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062. Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SURAT PERINTAH TUGAS

NO	SPT	HARI/ WAKTU	GIAT	PERSONIL			LOKASI
1	No. 300.1 / 1956 / SATPOLPP-B Tanggal 1 Januari 2025	Kamis, 1 Januari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pergantian Malam Tahun Baru 2026 di Kota Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1 / 02 / SATPOLPP-B Tanggal 2 Januari 2025	Jumat, 2 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
3	No. 300.1 / 03 / SATPOLPP-B Tanggal 2 Januari 2025	Sabtu, 3 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
4	No. 300.1 / 09 / SATPOLPP-B Tanggal 5 Januari 2025	Senin, 5 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Perayaan Natal Oikumene Nasional Tahun 2025	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

			di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak				
5	No. 300.1 / 38 / SATPOLPP-B Tanggal 9 Januari 2025	Jumat, 9 Januari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu di Mapolda Kalbar	SATPOL PP	6	Orang	Kubu Raya
6	No. 300.1 / 39 / SATPOLPP-B Tanggal 9 Januari 2025	Sabtu, 10 Januari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
7	No. 300.1 / 48 / SATPOLPP-B Tanggal 9 Januari 2025	Senin, 12 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kab Mempawah
8	No. 300.1 / 47 / SATPOLPP-B Tanggal 12 Januari 2025	Senin, 12 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			Gangguan Trantibum Pada Peresmian Sekolah Harapan Bangsa Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya				
9	No. 300.1 / 77 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Januari 2025	Kamis, 15 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Solmadapar di DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	10	Orang	Kab Mempawah
10	No. 300.1 / 78 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Januari 2025	Jumat, 16 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
11	No. 300.1 / 79 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Januari 2025	Sabtu, 17 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
12	No. 300.1 / 112 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Januari 2025	Selasa, 20 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Pelantikan	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya

			Kepengurusan Special Olympics Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2025 – 2029 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat				
13	No. 300.1 / 113 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Januari 2025	Selasa, 20 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Audiensi Baznas Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	3	Orang	Kota Pontianak
14	No. 300.1 / 118 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Januari 2025	Rabu, 21 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Rangkaian Peringatan HUT Ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
15	No. 300.1 / 119 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Januari 2025	Rabu, 21 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Pelantikan Pengurus DPD	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

			Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat di Qubu Resort Kubu Raya				
16	No. 300.1 / 127 / SATPOLPP-B Tanggal 21 Januari 2025	Kamis, 22 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Upacara Ziarah Taman Makam Pahlawan Patria Jaya di Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
17	No. 300.1 / 128 / SATPOLPP-B Tanggal 21 Januari 2025	Jumat, 23 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Upacara Ziarah Taman Makam Pahlawan Patria Jaya di Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
18	No. 300.1 / 134 / SATPOLPP-B Tanggal 22 Januari 2025	Kamis, 22 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum di Kota Pontianak	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

19	No. 300.1 / 135 / SATPOLPP-B Tanggal 22 Januari 2026	Kamis, 22 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Musyawarah KADIN Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Alimoer Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	3	Orang	Kota Pontianak
20	No. 300.1 / 153 / SATPOLPP-B Tanggal 23 Januari 2026	Sabtu, 24 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
21	No. 300.1 / 160 / SATPOLPP-B Tanggal 26 Januari 2026	Senin, 26 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
22	No. 300.1 / 167 / SATPOLPP-B Tanggal 27 Januari 2026	Rabu, 28 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan	SATPOL PP	14	Orang	Kabupaten Kubu Raya

			Trantibum Pada Kegiatan Upacara HUT Ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat				
23	No. 300.1 / 204 / SATPOLPP-B Tanggal 28 Januari 2026	Kamis, 29 Januari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Rangkaian Peringatan HUT Ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Lapangan Grand Mini Soccer.	SATPOL PP	11	Orang	Kabupaten Kubu Raya
24	No. 300.1 / 214 / SATPOLPP-B Tanggal 29 Januari 2026	Kamis, 29 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gerakan Pasar Pangan Murah Dalam Rangkaian HUT Ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	3	Orang	Kota Pontianak
25	No. 300.1 / 222 / SATPOLPP-B Tanggal 30 Januari 2026	Jumat, 30 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam	SATPOL PP	7	Orang	Kabupaten Kubu Raya

			Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Isra' Mi'raj 1447 H di Masjid An Na'im Kantor Gubernur Kalimantan Barat				
26	No. 300.1 / 226 / SATPOLPP-B Tanggal 30 Januari 2026	Minggu, 1 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Fun Run 6,9 km Rangkaian HUT Ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
27	No. 300.1 / 227 / SATPOLPP-B Tanggal 30 Januari 2026	Sabtu, 31 Januari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
28	No. 300.1 / 259 / SATPOLPP-B Tanggal 05 Februari 2026	Kamis, 5 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat di	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

			Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat				
29	No. 300.1 / 260 / SATPOLPP-B Tanggal 6 Februari 2026	Jumat, 6 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peresmian RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kubu Raya di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
30	No. 300.1 / 267 / SATPOLPP-B Tanggal 6 Februari 2026	Jumat, 6 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Solmadapar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
31	No. 300.1 / 274 / SATPOLPP-B Tanggal 10 Februari 2026	Senin, 9 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peresmian Toko Rakyat Serba Ada di Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	10	Orang	Kab Kubu Raya

	No. 300.1 / 310 / SATPOLPP-B Tanggal 12 Februari 2026	Kamis, 12 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
32	No. 300.1 / 312 / SATPOLPP-B Tanggal 13 Februari 2026	Jumat, 13 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh BEM Politeknik Negeri Pontianak di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
33	No. 300.1 / 313 / SATPOLPP-B Tanggal 13 Februari 2026	Sabtu, 14 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rapat Kerja Ikatan Motor Indonesia Provinsi Kalbar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

34	No. 300.1 / 314 / SATPOLPP-B Tanggal 13 Februari 2026	Minggu, 15 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Pengurus Daerah Kalimantan Barat Di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
35	No. 300.1 / 315 / SATPOLPP-B Tanggal 13 Februari 2026	Minggu, 15 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pawai Kendaraan Dalam Rangka Festival Pawai Obor Tahun 2026 Di Halaman Masjid Raya Mujahidin.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
36	No. 300.1 / 316 / SATPOLPP-B Tanggal 13 Februari 2026	Senin, 16 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Festival Pawai Obor Tahun 2026 Di Halaman Masjid Raya Mujahidin.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

37	No. 300.1 / 317 / SATPOLPP-B Tanggal 13 Februari 2026	Senin, 16 Februari 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Di Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
38	No. 300.1 / 332 / SATPOLPP-B Tanggal 18 Februari 2026	Rabu, 18 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Di Kota Pontianak	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
39	No. 300.1 / 333 / SATPOLPP-B Tanggal 18 Februari 2026	Rabu, 18 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Terawih Di Masjid Raya Mujahidin Pontianak	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
40	No. 300.1 / 343 / SATPOLPP-B Tanggal 19 Februari 2026	Kamis, 19 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan Di Halaman Masjid Mujahidin Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

41	No. 300.1 / 344 / SATPOLPP-B Tanggal 19 Februari 2026	Kamis, 19 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Bazar Ramadhan 1447 H Di Halaman Mesjid Raya Mujahidin	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
42	No. 300.1 / 349 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Jumat, 20 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik Di Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
43	No. 300.1 / 350 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Jumat, 20 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
44	No. 300.1 / 351 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Jumat, 20 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			1447 H Di Kota Pontianak.				
45	No. 300.1 / 352 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Sabtu, 21 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
46	No. 300.1 / 353 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Sabtu, 21 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan 1447 H Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
47	No. 300.1 / 354 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Minggu, 22 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Takjil Ramadhan Di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
48	No. 300.1 / 355 / SATPOLPP-B Tanggal 20 Februari 2026	Minggu, 22 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			1447 H Di Kota Pontianak.				
49	No. 300.1 / 367 / SATPOLPP-B Tanggal 24 Februari 2026	Selasa, 24 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Audiensi Masyarakat Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah Di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
50	No. 300.1 / 368 / SATPOLPP-B Tanggal 24 Februari 2026	Selasa, 24 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Konsolidasi akbar Mahasiswa Se-Kalimantan Barat Di Kampus IAIN Pontianak	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
51	No. 300.1 / 369 / SATPOLPP-B Tanggal 24 Februari 2026	Rabu, 25 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Perayaan Imlek Bersama 2577 Kongzili Tahun 2026 Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak

52	No. 300.1 / 383 / SATPOLPP-B Tanggal 26 Februari 2026	Kamis, 26 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Kalbar Menggugat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak
53	No. 300.1 / 384 / SATPOLPP-B Tanggal 26 Februari 2026	Kamis, 26 Februari 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Operasi Pasar Murah di Rasau Jaya Kabupeten Kubu Raya	SATPOL PP	2	Orang	Kab Kubu Raya
54	No. 300.1 / 399 / SATPOLPP-B Tanggal 02 Maret 2026	Senin, 2 Maret 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Aliansi Mahasiswa Kalbar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	14	Orang	Kota Pontianak
55	No. 300.1 / 406 / SATPOLPP-B Tanggal 03 Maret 2026	Selasa, 3 Maret 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

			Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Buka Puasa Bersama Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat				
56	No. 300.1 / 407 / SATPOLPP-B Tanggal 03 Maret 2026	Selasa, 3 Maret 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Perayaan Cap Go Meh di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
57	No. 300.1 / 429 / SATPOLPP-B Tanggal 06 Maret 2026	Jumat, 6 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar di Halaman Disnaker Provinsi Kalbar.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
58	No. 300.1 / 433 / SATPOLPP-B Tanggal 06 Maret 2026	Sabtu, 7 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Musyawarah Daerah (MUSDA) XI Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Di Hotel Golden Tulip.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

59	No. 300.1 / 434 / SATPOLPP-B Tanggal 06 Maret 2026	Minggu, 8 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peringatan Malam Nuzulul Quran Bersama Ustadz Das'ad Latif Di Masjid Al-Muhtadin Untan.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
60	No. 300.1 / 447 / SATPOLPP-B Tanggal 09 Maret 2026	Senin, 9 Maret 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Solmadapar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
61	No. 300.1 / 473 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Selasa, 17 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Arus Mudik Idul Fitri 1447H Di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	9	Orang	Kab Kubu Raya

62	No. 300.1 / 474 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Rabu, 18 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Mudik Gratis Idul Fitri 1447H Di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
63	No. 300.1 / 475 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Jumat, 20 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Sholat Idul Fitri 1447H Di Mesjid Mujahidin.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
64	No. 300.1 / 476 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Jumat, 20 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Malam Takbiran Idul Fitri 1447H Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
65	No. 300.1 / 477 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Sabtu, 21 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak

			Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Sholat Idul Fitri 1447H Di Kota Pontianak.				
66	No. 300.1 / 478 / SATPOLPP-B Tanggal 21 Maret 2026	Rabu, 25 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Open House Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak
67	No. 300.1 / 486 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Kamis, 19 Maret 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Festival Meriam Karbit di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
68	No. 300.1 / 487 / SATPOLPP-B Tanggal 17 Maret 2026	Senin, 23 Maret 2026	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Open House Hari Raya idul Fitri 1447 H di Rumah Dinas Sekretaris Daerah	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak

			Provinsi Kalimantan Barat				
69	No. 300.1 / 498 / SATPOLPP-B Tanggal 25 Maret 2026	Rabu, 25 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
70	No. 300.1 / 507 / SATPOLPP-B Tanggal 27 Maret 2026	Senin, 30 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Audiensi Aliansi Guru PPPK Paruh Waktu Provinsi Kalimantan Barat Di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
71	No. 300.1 / 526 / SATPOL.PP-B Tanggal 31 Maret 2026	Selasa, 31 Maret 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Antisipasi Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Konsolidasi BEM-SI Di Kota Pontianak	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak